

“STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH di KABUPATEN BANDUNG”

Eko Siswanto¹

Rira Nuradhawati²

Agustina Setiawan³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

ekosiswanto2005@gmail.com

Abstrak

Bencana alam selama ini sering dianggap sebagai force majeure, yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan atau kendali manusia dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam, diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal, mengingat Indonesia merupakan daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, termasuk fokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

Jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Seringnya bencana yang melanda wilayah Kabupaten Bandung, menguatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk membentuk dan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

Strategi dalam penanggulangan bencana di daerah menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji karena penanggulangan bencana harus diupayakan secara integral kepada seluruh elemen pemerintah daerah, non pemerintah dan masyarakat karena diperlukan dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung telah memenuhi kriteria perencanaan strategis menurut Bryson (dalam Muhammad, 2003: 61). Hal ini dapat dilihat dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung telah maksimal dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang datang setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Bandung dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung telah memenuhi kriteria perencanaan strategi menurut Bryson (dalam Muhammad, 2003:61). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung telah maksimal dalam upaya menangani bencana banjir yang datang setiap tahun.

Hal tersebut nampak dari adanya program-program yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan Sarana dan Prasarana, perbaikan Perumahan akibat bencana alam / sosial, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, penanganan darurat kebencanaan dan pengendalian banjir. Banyaknya para pemangku kepentingan dalam mengelola Sungai Citarum dan mengendalikan atau menanggulangi bencana banjir khususnya di Kabupaten Bandung guna mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten Bandung belum mampu mewujudkan Sungai Citarum yang bersih, sehat dan produktif serta memberikan manfaat yang berkesinambungan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung.. Selain itu juga nampak terjalinnya sinergitas antar sektor terkait dalam memberikan bantuan pertolongan pada saat terjadi bencana banjir.

Kata Kunci: Strategi, BPBD, Bencana, Banjir.

Abstract

Natural disasters have often been considered as force majeure, which is an event that occurs beyond human ability or control and cannot be avoided. Therefore, to minimize the loss

of life due to natural disasters, vigilance and preparedness in dealing with disasters are needed, ideally already possessed by the community through local wisdom, considering that Indonesia is an area at high risk of disasters. The government is responsible for organizing disaster management, including focusing on post-disaster reconstruction and rehabilitation.

Guarantees for the fulfillment of the rights of the community and refugees affected by the disaster fairly and in accordance with service standards must be immediately attempted, this is to minimize the loss of more victims. The frequent disasters that hit the Bandung Regency area, strengthen the Bandung Regency Regional Government to form and establish the Bandung Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD).

The strategy in disaster management in the region is an interesting thing to study because disaster management must be attempted integrally to all elements of the local government, non-government and community because it is needed in disaster management efforts that are effective, efficient and sustainable. The purpose of this study was to determine and describe the strategies used by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in flood disaster management in Bandung Regency.

This study was conducted using a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study indicate that the flood disaster management strategy carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bandung Regency has met the strategic planning criteria according to Bryson (in Muhammad, 2003: 61). This can be seen from the existence of the Bandung Regency BPBD Strategic Plan (Renstra). The Bandung Regency BPBD has maximized its efforts in overcoming the flood disaster that occurs every year.

Based on the results of research on the Flood Disaster Management Strategy by the Regional Disaster Management Agency in Bandung Regency, it can be concluded that the flood disaster management strategy carried out by the Bandung Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) has met the strategic planning criteria according to Bryson (in Muhammad, 2003: 61). This can be seen from the existence of the Bandung Regency BPBD Strategic Plan (Renstra). The Bandung Regency BPBD has made maximum efforts in handling the flood disaster that occurs every year.

This can be seen from the programs that have been implemented, including improving Facilities and Infrastructure, repairing Housing due to natural / social disasters, early prevention and handling of natural disaster victims, emergency disaster management and flood control. The large number of stakeholders in managing the Citarum River and controlling or

handling flood disasters, especially in Bandung Regency in order to realize the vision and mission of the Bandung Regency BPBD has not been able to realize a clean, healthy and productive Citarum River and provide sustainable benefits in handling flood disasters in Bandung Regency. In addition, there is also a synergy between related sectors in providing assistance when a flood disaster occurs.

Keywords: *Strategy, BPBD, Disaster, Flood.*

PENDAHULUAN

Bencana alam selama ini seringkali dianggap sebagai *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan atau kontrol manusia dan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, guna meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana alam maka diperlukan kesadaran dan juga kesiapan dalam menghadapi bencana yang idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah resiko tinggi terhadap bencana.

Penanggulangan bencana sendiri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya di tanggap secara parsial oleh pemerintah, bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Selain itu juga kurangnya kebijakan dan strategi juga koordinasi antar elemen dianggap sebagai factor penyebab penanggulangan bencana ditanggapi secara parsial oleh pemerintah.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam penanggulangan banjir di wilayah Baleendah Kabupaten Bandung. Meskipun banjir terjadi setiap tahun dan tidak pernah ada penyelesaian yang nyata disebabkan janji-janji yang menyertai penanganan permasalahan tersebut sampai saat ini belum terwujud, kondisi tersebut membuat para korban muak dan merasa hanya jadi korban dari janji-janji pemerintah.

Pada akhirnya, puncak kemarahan tersebut ditandai dengan adanya ratusan massa yang terdampak banjir melakukan unjuk rasa Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam aksinya tersebut, massa menuntut Pemerintah Kabupaten Bandung guna segera menangani persoalan banjir secara serius. Pengendalian tata ruang di wilayah sungai yang dianggap sebagai salah satu penyebab banjir semakin parah dari waktu ke waktu. Akibatnya, menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat dan membanjiri kawasan pemukiman penduduk.

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus terhadap rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal tersebut untuk meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

METODE PENELITIAN

peneliti menggunakan metode deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini karena peneliti menggunakan metode kualitatif. Ini berarti bahwa penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Menurut Sugiyono (2012 : 62) Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data untuk mengumpulkan data.

KERANGKA PEMIKIRAN

Bencana alam atau *natural disaster*, adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, badai tropis, tornado, kebakaran liar, badai salju, hujan es, gelombang panas, tanah longsor dan wabah penyakit. Bencana alam lain yang diakibatkan dari luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari.

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan sebagainya. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang dilakukan secara terarah mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Bencana alam di Indonesia terjadi hampir setiap hari di berbagai tempat yang berbeda dan penanggulangan bencana tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, upaya penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sesuai dengan arah pengembangan penanggulangan bencana di tingkat nasional agar berjalan efektif dan efisien. Maka, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berbicara tentang bencana, Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang berpotensi rawan bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung dan banjir.

Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Banjir pada dasarnya merupakan proses alamiah dan dapat menjadi bencana bagi manusia bila proses itu menyebabkan kerugian materi maupun kerugian jiwa. Dalam konteks sistem alam, banjir terjadi pada tempatnya. Banjir akan mengenai manusia jika mendiami daerah yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Sehingga, bukan banjir yang datang, melainkan manusia yang mendatangi daerah rawan banjir. Setiap tahun wilayah Baleendah Kabupaten Bandung selalu dilanda bencana banjir seperti yang terjadi pada 08 Maret 2017 lalu, Kabupaten Bandung kembali dikepung banjir, ketinggian permukaan banjir selama 10 hari terakhir mencapai 70 centimeter hingga 2 meter di daerah pemukiman warga, sehingga akses utama lalu lintas dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung di wilayah Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang dan sekitarnya lumpuh total.

PEMBAHASAN

Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD di Kabupaten Bandung

Keberadaan Personil BPBD Kabupaten Bandung Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	13
3	Golongan II	11
4	Golongan I	0
Jumlah		29

Sumber : Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 : 33

1. Keberadaan personil BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan

Keberadaan Personil BPBD Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Received :20 jan 2025

Accepted :20 jan 2025

Published :10 feb 2025

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	S2	5
2	S1	15
3	D4	0
4	D3	1
5	SLTA	8
6	SLTP	0
7	SD	0
Jumlah		29

Sumber : Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 : 34

2. Keberadaan personil BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan pendidikan struktural

Keberadaan Personil BPBD Kabupaten Bandung

Berdasarkan Pendidikan Struktural

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Adum / Diklatpim IV / Spada	8
2	Adumla / Spala	0
3	Spama / Diklatpim III / Spadya	5
4	Diklatpim II / Spamen	1
Jumlah		14

Sumber : Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 : 35

3. Keberadaan personil Kabupaten Bandung non-pns

Keberadaan Personil BPBD Kabupaten Bandung Non PNS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TKK (SLTA)	-
2	Pekerja Harian Lepas (PHL)	
	- S1	3
	- D3	1
	- SLTA / STM	17
	- SLTP	2
	- SD	0
Jumlah		23

Sumber : Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 : 36

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD di Kabupaten Bandung. Penelitian ini juga dilakukan sejak 17 Juni 2024 sampai dengan 10 Juli 2024. Selama penelitian berlangsung peneliti melakukan observasi serta wawancara baik secara langsung maupun tidak. Peneliti juga menyajikan delapan informan dimana seluruh informan merupakan *key informan* (informan kunci) dalam penelitian ini. Penelitian ini berawal dari strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung yang mengharuskan adanya strategi yang didalamnya terdapat tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang sesuai untuk mendorong suatu keberhasilan yang diinginkan dan strategi tersebut dijabarkan dalam rencana strategis BPBD Kabupaten Bandung, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD di Kabupaten Bandung.

Terdapat sepuluh kriteria dalam merumuskan strategi menurut Bryson (dalam Muhammad, 2013 : 61) bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah seperti penanggulangan bencana alam yang mengharuskan menggunakan strategi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah akan dikatakan berhasil apabila strategi yang mereka buat dapat bermanfaat dan dirasakan.

Persetujuan Awal Proses Perencanaan Strategi

Dengan menyetujui kesepakatan awal dari perencanaan strategi adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang yang memiliki posisi penting dalam pembuatan keputusan ataupun dalam membentuk opini internal tentang seluruh upaya perencanaan dan langkah perencanaan strategis yang penting. Dukungan dan komitmen merupakan hal yang penting jika menginginkan perencanaan strategis berhasil. Maka, nampak dengan jelas bahwa peranan dari orang atau kelompok yang memiliki posisi penting harus turut andil dalam memulai suatu proses. Kriteria pertama perumusan strategis merupakan acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. n hasilnya oleh masyarakat didaerahnya.

Mandat Organisasi

Mandat merupakan perintah ataupun instruksi yang diberikan organisasi kepada seseorang atau beberapa orang, sesuai dengan kehendak yang memberikan mandat. Sebelum suatu organisasi mendefinisikan misi dan nilainya, terlebih dahulu harus tahu pasti persyaratan apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh otoritas eksternal. Persyaratan tersebut biasanya dimuat dalam undang-undang, pasal-pasal atau piagam, dan lebih mudah untuk dibuka dan diklasifikasikan daripada misi organisasi. Terkadang organisasi juga menghadapi mandat informal, terutama yang dilembagakan dalam norma-norma yang tidak kurang mengikatnya.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Lingkungan internal adalah upaya mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sumber daya (input), strategi yang dijalankan sekarang

(proses) dan kinerja (*output*). Sedangkan lingkungan eksternal adalah tindakan mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi guna mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal merupakan factor-faktor yang berada diluar kontrol organisasi, meliputi kecenderungan politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi dan kelompok masyarakat yang harus dilayani.

Identifikasi Isu Strategis

Upaya identifikasi isu merupakan langkah yang tidak kalah penting guna mengetahui persoalan kritis yang dihadapi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan mandat, visi, misi dan nilai, kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal akan dapat mengidentifikasi persoalan organisasi. Pernyataan isu strategis harus mengadung tiga unsur. Pertama adalah isu harus disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Kedua, factor yang menyebabkan isu menjadi persoalan kebijakan penting harus didafta yang mencakup aspek mandat, misi, nilai-nilai, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Ketiga, konsekuensi kegagalan dalam menghadapi isu harus menjadi taruhan hidup dan matinya organisasi.

Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan langkah – langkah kedepan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan dan merancang strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Formulasi strategi juga meliputi identifikasi peluang dan ancaman eksternal, mengukur dan menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, mengumpulkan alternatif, serta memilih strategi – strategi khusus yang akan di terapkan untuk pemecahan masalah tertentu.

Analisis (*review*) dan Adopsi Strategi

Analisis atau review adalah kegiatan dalam mengkaji ulang apakah strategi yang digunakan dengan melihat hasil analisis factor internal dan eksternal dapat diimplementasikan

atau tidak guna memecahkan masalah seperti penanggulangan banjir. Jika dalam hasil review terdapat hal yang tidak sesuai, maka strategi yang telah direncanakan dapat dibatalkan dan diganti dengan strategi lainnya. Strategi bisa dari strategi baru dengan mengambil contoh daerah lain dengan kasus yang sama ataupun membuat strategi baru.

Penetapan Visi Organisasi

Upaya menciptakan visi organisasi yang efektif merupakan langkah terakhir dalam proses perencanaan. Organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi tersebut sehingga berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Adapaun upaya BPBD Kabupaten Bandung dalam mengembangkan seluruh potensinya agar penanggulangan banjir berjalan efektif, efisien dan berhasil sesuai dengan visi dan misinya, maka diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dan juga pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Sehingga bencana banjir tidak seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, namun masyarakat dan juga pihak swasta turut aktif dalam penanggulangan banjir agar dapat meminimalisir dampak bencana tersebut.

Rencana Implementasi Strategi

Implementasi adalah inti dari seluruh kegiatan perencanaan yang telah dibuat. Proses implementasi strategi adalah jumlah dari keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan suatu proses dimana beberapa strategi diubah menjadi suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci sukses dari manajemen strategi. Proses implementasi strategi memerlukan kejelasan siapa yang mengimplementasikan strategi, apa yang

dilakukan misalnya seperti apa programnya, berapa anggaran yang dibutuhkan dan prosedur seperti apa yang digunakan dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Bandung dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung telah memenuhi kriteria perencanaan strategi menurut Bryson (dalam Muhammad, 2003:61). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung telah maksimal dalam upaya menangani bencana banjir yang datang setiap tahun.

Hal tersebut nampak dari adanya program-program yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan Sarana dan Prasarana, perbaikan Perumahan akibat bencana alam / sosial, pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, penanganan darurat kebencanaan dan pengendalian banjir. Banyaknya para pemangku kepentingan dalam mengelola Sungai Citarum dan mengendalikan atau menanggulangi bencana banjir khususnya di Kabupaten Bandung guna mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten Bandung belum mampu mewujudkan Sungai Citarum yang bersih, sehat dan produktif serta memberikan manfaat yang berkesinambungan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung.. Selain itu juga nampak terjalinnya sinergitas antar sektor terkait dalam memberikan bantuan pertolongan pada saat terjadi bencana banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menhadapi Bencana*. Jakarta : BNPB
- Bryson, John M. 2008. *Strategic Planning For Public and Non Profit Organization*. San Fransisco : Jossey-bass.
- Effendy, Onong Unchjana. 2007. *Strategi Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Jatnika, D. Asep. 2008. *Diktat Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : UNPAD FISIP DIII
- Kondoatie, Robert. J dan Syarief, Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2013. *Strategi Pemerintahan, Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Talizudhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung : Alfabeta.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi Yang Kreatif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Stoner, James A.F. 2003. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suradinata, Ernaya. 1996. *Organisasi Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Syihab, Usman dan Yulaelawati, Ella. 2008. *Mencerdasi Bencana*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Dokumen :

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Bandung.

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

Eko, T.P. 2003. *Modul Manajemen Bencana Pengelana Banjir Untuk Penanggulangan Bencana* (Online). www.peduli-bencana.

Website :

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>

DOI : <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2918>

Received :20 jan 2025

Accepted :20 jan 2025

Published :10 feb 2025

Belasan Tahun Jadi Korban Banjir Warga Kabupaten Bandung Geruduk Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/03/31/>

Banjir Bandung Selatan Meluas, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/03/08/>

Korban Banjir Bandung Selatan Mencapai 79.563 Orang, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/03/09/>

Balai Besar Wilayah Citarum, dalam <http://bbwscitarum.com/>

Para Pemangku Kepentingan Pengendalian Sungai Citarum, dalam <http://citarum.org/tentang-kami/para-pemangku-kepentingan.html>

Sejarah, Visi dan Misi Kabupaten Bandung, dalam <http://www.bandungkab.go.id/>

Tupoksi BPBD Kab. Bandung, dalam <http://bpbd-kabbandung.blogspot.co.id>

eko, T.P. 2003. Modul Manajemen Bencana Pengenalan Banjir Untuk Penanggulangan Bencana (Online). www.peduli-bencana.or.id